# PEMIDANAAN TERHADAP ANAK

**PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN**

**PADA PERKARA Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Slw**

****

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Strata-1 dalam Ilmu Hukum**

**Oleh:**

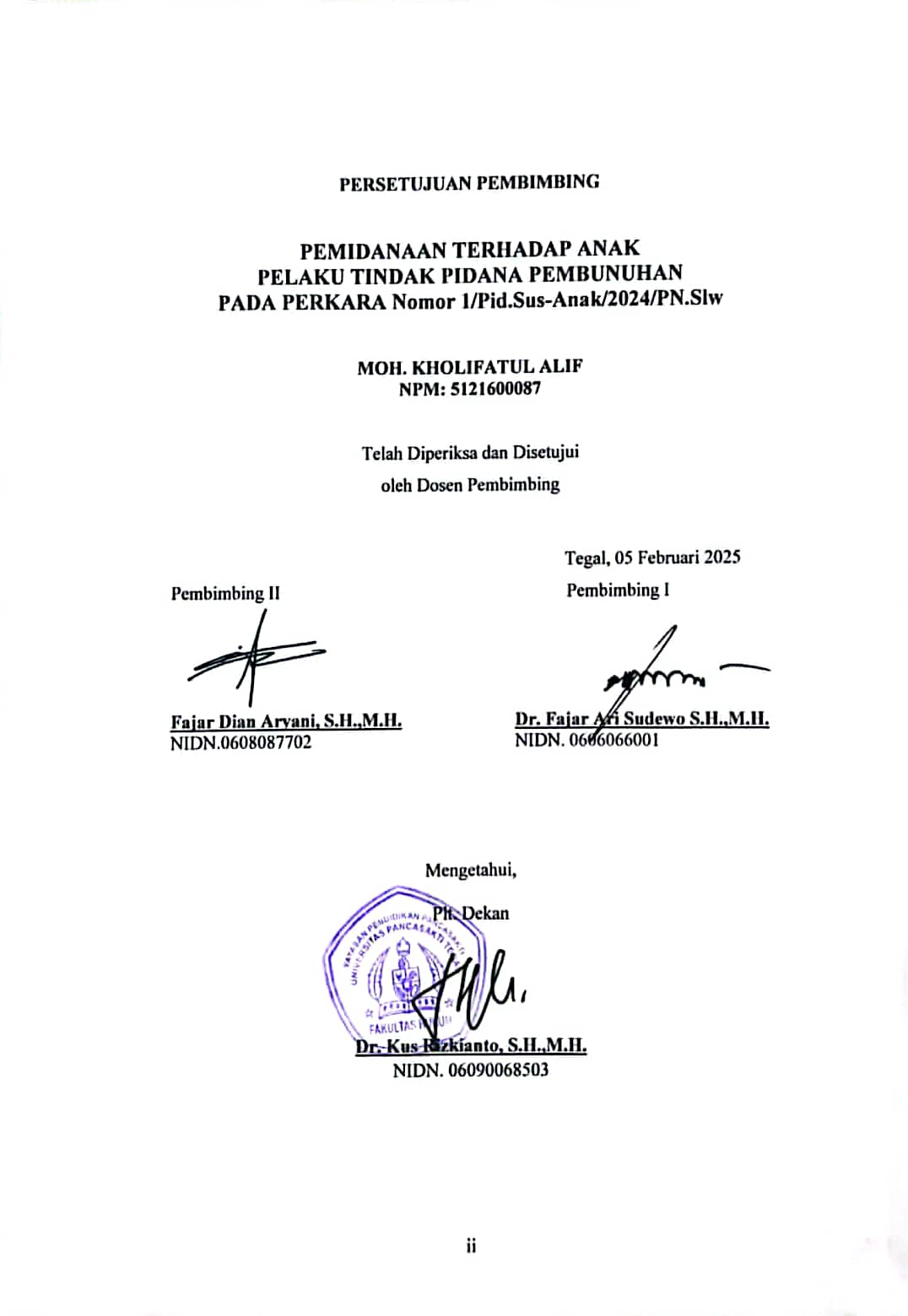
**MOH. KHOLIFATUL ALIF**

**NPM:** **5121600087**

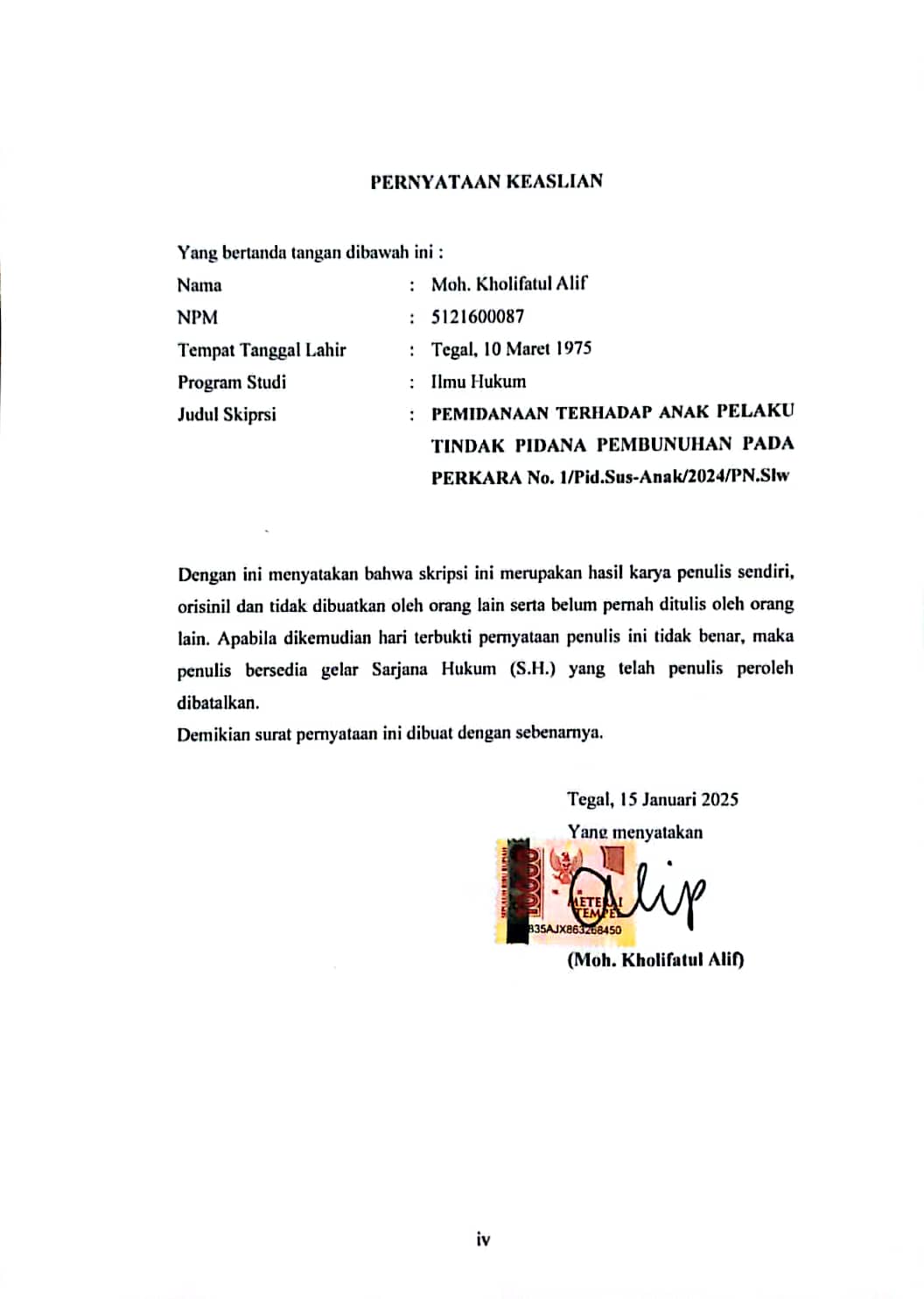
**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL**

**2025**

****

****

****

# ABSTRAK

Kasus kejahatan yang terjadi di masyarakat semakin sering terjadi sekarang ini semakin meningkat dari tahun ke tahun, demikian kejahatan yang terjadi di masyarakat meningkat di Negara-negara yang sedang berkembang, salah satu tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat adalah tindak pidana pembunuhan, pembunuhan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menghilangkan/merampas nyawa orang lain, pembunuhan memiliki tujuan untuk menghilangkan dan merampas nyawa orang lain, tindak pidana pembunuhan biasanya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi tindak pidana ini juga dilakukan oleh anak seperti yang dilakukan terdakwa pertama dan kedua yang dengan Turut serta melakukan pembunuhan yang disertai dengan tindak pidana lain. Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui Pengaturan pemidanaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan (2) Penerapan pidana terhadap anak pelaku Tindak Pidana Pembunuhan pada perkara Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Slw.Metode Penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan adalah Yuridis Sosiologis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, Teknik pengumpulan data yaitu dengan studi pustaka dan wawancara, serta kajian peraturan Perundang- Undangan, data dari putusan dan Peraturan-Peraturan yang berkaitan dengan objek penelitian sehingga menghasilkan metode analisis data secara kualitatif. Hasil Penelitian ini menyebutkan : pertama Pertimbangan bagi hakim dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku pembunuhan yang dilakukan oleh anak dibawah umur di Pengadilan Negeri Slawi adalah dengan pertimbangan yaitu perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat luas, perbuatan tergolong sangat sadis, Kedua dalam memutuskan sesuai dengan ketentuan Pasal 79 Ayat Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Serta merujuk pula pada Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

## Kata Kunci: Pemidanaan, Tindak Pidana Pembunuhan, Anak.

# *ABSTRACT*

# *Criminal cases that occur in society are increasingly frequent now, increasing from year to year, thus crimes that occur in society are increasing in developing countries, one of the criminal acts committed by society is the crime of murder, murder is any act that is done intentionally to eliminate/take the life of another person, murder has the aim of eliminating and taking the life of another person, the crime of murder is usually committed by adults, but this crime is also committed by children as was done by the first and second defendants who participated in committing murder accompanied by other crimes. The purpose of this study is (1) To determine the criminal provisions for children who commit the crime of murder (2) Application of criminal penalties to children who commit the crime of murder in case Number 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Slw. The research method in this study uses a Juridical Sociological approach method. The types of data used in this study are primary data and secondary data, Data collection techniques are through literature studies and interviews, as well as studies of laws and regulations, data from decisions and regulations related to the object of research so as to produce qualitative data analysis methods. The results of this study state: first, considerations for judges in imposing criminal sanctions on perpetrators of murder committed by minors in the Slawi District Court are with the consideration that the defendant's actions are very disturbing to the wider community, the actions are classified as very sadistic, Second, in deciding in accordance with the provisions of Article 79 Paragraph of Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. And also referring to Article 81 Paragraph (1) of Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System.*

# *Keywords: Criminalization, Criminal Act of Murder, Children.*

**HALAMAN MOTTO**

“Jadikanlah Kekurangan Kita Sebagai Kelebihan yang Tidak Dimiliki Orang Lain.”

**HALAMAN PESEMBAHAN**

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

* Allah SWT yang sudah memberi kelancaran dalam setiap proses untuk menuntut ilmu di Perguruan Tinggi ini dari awal sampai akhir;
* Keluarga, terima kasih untuk pengorbanan, dukungan, cinta kalian sehingga atas doa dan restu mereka saya dapat menyelesaikan skripsi ini;
* Istri dan Anak-anak tersayang;
* Juga untuk semua teman dan sahabat yang telah membantu saya baik dalam materil maupun moriil. Semoga Allah SWT akan membalas kebaikan kalian.

# KATA PENGANTAR

*Alhamdulilahhirabbil’alamin*, puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT, berkat rahmat dan ridhlo-nya serta limpahan rahmat, taufiq serta inayah- nya. Dan tidak lupa pula penulis panjatkan shalawat serta salam kepada Nabi kita Muhamad SAW, yang kita tunggu safaatnya diakhirat kelak, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.

Skripsi ini disusun guna melengkapi tugas akhir penulis sebagai mahasiswa Fakultas Hukum dalam menyelesaikan Program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal dan juga dalam rangka memperoleh gelar sarjana strata satu (S-1) Ilmu Hukum.

Penulis juga tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang selalu mendukung untuk menyelesaikan tugas skripsi, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dr. Taufiqulloh, M.Hum.. selaku Rektor Universitas Pancasakti Tegal
2. Dr. Kus Rizkianto, S.H.,M.H., selaku Plt Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
3. Dr. Soesi Idayanti, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
4. Fajar Dian Aryani, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Bidang Keuangan dan SDM Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal sekaligus Dosen Pembimbing II dalam skripsi ini yang telah banyak memberikan bantuan petunjuk dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Dr. Mohammad Khamim, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
6. Dr. Fajar Ari Sadewo, S.H., M.H selaku Pembimbing I dalam skripsi ini yang telah banyak memberikan bantuan petunjuk dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan pada penulis sehingga bisa menyelesaikan studi strata I.
8. Segenap pegawai administrasi/karyawan Universitas Pancasakti Tegal khususnya Fakultas Hukum yang telah memberikan layanan akademik dengan sabar dan ramah.
9. Orang tua, istri, anak – anak, sanak saudara, atasan, rekan-rekan kantor penulis yang membantu baik dalam moriil maupun materiil pada penulis dalam menempuh studi.
10. Para sahabat penulis dan semua pihak yang memberikan motivasi dalam menempuh studi maupun dalam penyusunan skrisi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati, segala bentuk kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis.

Tegal, 15 Januari 2025 .

Penulis

**DAFTAR ISI**

HALAMAN JUDUL i

PERSETUJUAN PEMBIMBING ii

HALAMAN PENGESAHAN iii

PERNYATAAN KEASLIAN iv

ABSTRAK v

*ABSTRACT* vi

HALAMAN MOTTO vii

PERSEMBAHAN viii

KATA PENGANTAR ix

DAFTAR ISI xi

BAB I PENDAHULUAN 1

* 1. Latar Belakang Masalah 1
  2. [Rumusan Masalah](#_TOC_250022) 6
  3. [Tujuan Penelitian](#_TOC_250021) 6
  4. [Urgensi Penelitian](#_TOC_250020) 7
  5. [Tinjauan Pustaka](#_TOC_250019) 7
  6. [Metode Penelitian 1](#_TOC_250018)2
  7. [Sistematika Penulisan](#_TOC_250017) 15

[BAB II TINJAUAN PUSTAKA](#_TOC_250016) 17

* + 1. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana, Tindak Pidana, Pidana dan Pemidanaan 17
       1. Hukum Pidana 17
       2. [Tindak](#_TOC_250013) Pidana 21
       3. [Jenis-jenis](#_TOC_250012) Tindak Pidana 24
       4. [Pidana](#_TOC_250011) dan Pemidanaan 27
       5. [Tujuan](#_TOC_250010) Pemidanaan 28
    2. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pembunuhan 30
       1. [Pengertian](#_TOC_250009) Pembunuhan 30
       2. [Unsur-unsur Tindak Pidana Pembunuhan](#_TOC_250008)  32
       3. [Macam-macam](#_TOC_250007) Pembunuhan 33
    3. [Tinjauan](#_TOC_250006) Umum Tentang Anak 35
       1. Pengertian Anak 35
       2. Sistem Peradilan Anak 37

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 41

1. Pengaturan pemidanaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan 41
2. Penerapan pidana terhadap anak pelaku Tindak Pidana Pembunuhan pada perkara Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Slw 49

BAB IV PENUTUP 63

1. Kesimpulan 63
2. Saran 64

DAFTAR PUSTAKA 65

# 

# BAB I

# PENDAHULUAN

1. **Latar Belakang Masalah**

Upaya penegakan hukum terhadap suatu tindak pidana dilakukan secara meneyeluruh oleh aparatur penegak hukum dalam semua bidang. Penegakan hukum pidana dapat diartikan sebagai penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Aparat penegak hukum dapat menggunakan kekuataan paksaan apabila diperlukan.[[1]](#footnote-1)

Salah satu tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat adalah tindak pidana pembunuhan. Pembunuhan adalah setiap pebuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menghilangkan/merampas jiwa orang lain. Selain itu pembunuhan dianggap perbuatan yang sangat terkutuk dan tidak berperikemanusiaan. Dipandang dari sudut agama, pembunuhan merupakan suatu tindakan yang terlarang bahkan tidak boleh dilakukan. Didalam tindak pidana pembunuhan yang menjadi sasaran si pelaku adalah nyawa seseorang yang tidak dapat diganti dengan apapun. Dan perampasan itu sangat bertentangan dengan Undang-Undang 1945 yang berbunyi: “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”.[[2]](#footnote-2)

Kejahatan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam buku kedua dimulai dari Pasal 104 dengan Pasal 488 yang menjelaskan dan mengatur tentang berbagai jenis kejahatan, dan yang menjadi salah satu jenis kejahatan yang selalu di dengar ditelinga masyarakat serta yang selalu muncul di media masa adalah pembunuhan yang dimana pembunuhan terdapat pada Pasal 338 KUHP, dimana pembunuhan sendiri dalam sejarah kehidupan atau peradaban manusia telah menjadi sejak dahulu kala dan pengaturannya atau hukumannya pun telah ditentukan.[[3]](#footnote-3)

Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan Penerus pembangunan yaitu generasi yang disiapkan sebagai subyek pelaksana. pembangunan yang berkelanjutan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia.

Apabila kita melihat kedalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disingkat KUHP, segera dapat diketahui bahwa pembentuk undang-undang telah bermaksud mengatur ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan-kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang itu dalam Buku ke II Bab ke-XIX KUHP yang terdiri dari tiga belas pasal, yakni dari Pasal 338 sampai dengan Pasal 350. Salah satu masalah yang sering muncul dimasyarakat adalah tindak pidana pembunuhan, tindak pidana pembunuhan adalah suatu bentuk kejahatan dalam jiwa seseorang dimana perbuatan tersebut sangat bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat yaitu norma agama dan adat-istiadat, sekaligus bertentangan dengan norma ketentuan hukum pidana dan melanggar hak asasi manusia yaitu hak hidup.[[4]](#footnote-4)

Kasus tindak pidana pembunuhan yang melibatkan seorang anak, baik posisinya sebagai korban maupun sebagai pelaku, sering terjadi. Anak dalam hal ini berada dalam posisi pelaku intensitas perbuatannya sudah dapat dikatakan sangat memprihatinkan dan tidak bermoral. Salah satu kasus yang baru saja terjadi di Desa Kertasari, Kecamatan Surodadi, Kabupaten Tegal pada tanggal 7 Februari 2024, terjadi Tawuran yang mengakibatkan korban Anak meninggal dunia setelah dirujuk ke rumah sakit dengan diagnose luka bacok pada lengan atas kiri yang menembus dada dan paru yang mengakibatkan pendarahan hebat.

Pemidanaan anak dikenal asas ultimum remedium disamping asas kepentingan terbaik bagi anak yang memiliki landasan hukum dalam instrumen-instrumen internasional seperti Beijing Rules, Riyadh Guidelines, dan Peraturan-peraturan PBB bagi perlindungan anak yang kehilangan kebebasannya. Ketentuan hukum internasional seperti Beijing Rules (*United Nations Standard Minimum Rules For The Administration of Juvenile Justice*) menjelaskan serta mempertegas sistem peradilan anak yang baik harus mengutamakan kesejahteraan anak dan selalu memastikan bahwa reaksi apapun itu terhadap pelaku atau pelanggar hukum yang dikategorikan sebagai anak akan sepadan dengan keadaan-keadaan baik pelanggar hukumnya atau pelanggaran hukumnya dan anak hanya dapat dihilangkan kemerdekaannya harus sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Instrumen Internasional maupun nasional tersebut.[[5]](#footnote-5)

*United Nations Rules For The Protection of Juveniles Deprived of Their Liberty* menjelaskan bahwa sistem peradilan anak harus menjunjung tinggi hak-hak serta keselamatan dan juga memajukan kesejahteraan fisik dan mental anak. Hukuman penjara itu pun juga seharusnya menjadi upaya paling akhir untuk pemidanaan dan dengan jangka waktu yang relatif pendek (masa minimum) serta terbatas pada kasus yang bisa dianggap luar biasa apabila dilakukan oleh seorang anak (Beijing Rules, prinsip-prinsip umum butir ke-5 tentang tujuan-tujuan peradilan bagi anak). Pada The Riyadh Guidelines butir 54 juga disebutkan bahwa tidak seorang anak atau remaja pun yang menjadi obyek langkah-langkah penghukuman.[[6]](#footnote-6)

Untuk anak yang berkonflik dengan hukum terkait perbuatan pidana pembunuhan yang dilakukannya apabila telah berumur 14 tahun sampai dengan 18 tahun sebaiknya tetap melalui tahapan persidangan di pengadilan. Penjatuhan pidana atau tidaknya diserahkan kepada pertimbangan hakim dengan berpokok pada UU SPPA dan sanksi yang telah ditentukan (1/2 dari masa pidana orang dewasa) dan apabila penjatuhan pidana penjara (sebagai *ultimum remedium*) yang dikenakan oleh hakim, maka demi asas kepentingan terbaik bagi anak maka ditempatkan dalam Lapas Anak dengan kuantitas dan kualitas pelayanan dan infrastruktur yang memadai dan juga harus menghormati dan memenuhi hak-hak mereka sebagai seorang anak.[[7]](#footnote-7)

Pasal 1 angka 1 UU No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak mendefinisikan anak tersebut sebagai anak yang berkonflik dengan hukum yaitu anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Pada umumnya anak yang dalam rentang umur 12 tahun sampai 17 tahun sebagaimana definisi undang-undang tersebut sejatinya sudah mampu berfikir rasional dan logis, sudah mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah, seiring dengan masa akil balik mereka sehingga apabila berkonflik dengan hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Setiap anak mempunyai hak-hak dasar yang perlu dipenuhi, dijaga dan dilindungi oleh semua orang. Apabila anak tersangkut masalah sebisa mungkin untuk dijauhkan dari ranah hukum, menjaga dan melindungi serta memenuhi hak-hak anak tanpa terkecuali.[[8]](#footnote-8) Terhadap anak yang melakukan tindak pidana tersebut akan dilakukan tindakan hukum atau proses hukum.

Dalam tindakan hukum tersebut, yang masih anak-anak lebih didepankan pada aspek perlindungan hak-hak anak tersebut dalam tiap tingkat pemeriksaannya Jika harus dilakukan proses hukum terhadap anak maka tentunya kurang adil jika kepada terdakwa anak diberlakukan proses hukum yang sama dengan terdakwa dewasa. Begitu juga dengan pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada anak, tentunya sangat tidak adil jika pidana yang harus dijalani sama dengan pidana terdakwa dewasa. Apalagi mengingat bahwa anak merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa, sehingga dalam menangani tindak pidana yang dilakukan oleh anak, harus memperhatikan kepentingan dan masa depan anak.[[9]](#footnote-9)

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang pengaturan pemidanaan dan pertimbangan hukum hakim terhadap penerapan pidana terhadap tindakpidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak. Untuk itu penulis mengangkat skripsi dengan judul: Pemidanaan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Pada Perkara Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Slw.

1. **Rumusan Masalah**
2. Bagaimana pengaturan pemidanaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan ?
3. Bagaimana proses penerapan pidana terhadap anak pelaku Tindak Pidana Pembunuhan pada perkara Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Slw?
4. **Tujuan Penelitian**
5. Untuk mendeskripsikan pengaturan pemidanaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan?
6. Untuk mengkaji proses penerapan pidana terhadap anak pelaku Tindak Pidana Pembunuhan pada perkara Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Slw.
7. **Urgensi Penelitian**

Adapun urgensi dari dilakukannya penelitian ini adalah adanya Kasus tindak pidana yang melibatkan seorang anak, baik posisinya sebagai korban maupun sebagai pelaku, sering terjadi. Anak dalam hal ini berada dalam posisi pelaku intensitas perbuatannya sudah dapat dikatakan sangat memprihatinkan dan tidak bermoral., sistem peradilan anak harus menjunjung tinggi hak-hak serta keselamatan dan juga memajukan kesejahteraan fisik dan mental anak. Hukuman penjara itu pun juga seharusnya menjadi upaya paling akhir untuk pemidanaan dan dengan jangka waktu yang relatif pendek (masa minimum) serta terbatas pada kasus yang bisa dianggap luar biasa apabila dilakukan oleh seorang anak. Sehingga penelitian ini dapat mendeskripsikan bagaimana pengaturan pemidanaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan , serta mengkaji bagaimana proses penerapan pidana terhadap anak pelaku Tindak Pidana Pembunuhan pada perkara Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Slw.

1. **Tinjauan Pustaka**
2. Afif Fadhly, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan No. 1291/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Mks).” Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar, 2016.[[10]](#footnote-10)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil dan pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dalam Putusan No. 1291/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Mks. Penulis mendapatkan hasil sebagai berikut. (1). Jaksa Penuntut Umum menggunakan 3 (tiga) dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu: Kesatu, Primair Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 56 ke-1 KUHP, Subsidair Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 56 ke-1 KUHP, Lebih Subsidair Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo. Pasal 56 ke-1 KUHP. Kedua, Primair Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 56 ke-2 KUHP, Subsidair Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 56 ke-2 KUHP, Lebih Subsidair, Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo. Pasal 56 ke-2 KUHP. Ketiga, Primair Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Subsidair Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Lebih Subsidair Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP. Diantara unsur-unsur Pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, yang terbukti secara sah dan meyakinkan adalah Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 56 ke-1 KUHP. Dimana, antara perbuatan dan unsur-unsur Pasal saling mencocoki. (2). Dalam putusan No. 1291/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Mks pengambilan keputusan yang di ambil oleh Majelis Hakim menurut Penulis sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku seperti yang diharapkan oleh Penulis. Berdasarkan fakta-fakta di persidangan menilai bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya dengan pertimbangan bahwa pada saat melakukan perbuatannya terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkannya dan tidak mengurungkan niatnya, pelaku dalam melakukan perbuatannya dalam keadaan sehat dan cakap untuk mempertimbangkan unsur melawan hukum, serta tidak adanya alasan penghapusan pidana.

Persamaan dalam penelitian yang akan penulis lakukan adalah sama – sama membahas mengenai Tindak Pidana Pembunuhan yang dilakukan oleh Anak, adapun perbedaannya pada permaslahan yang dibahas yaitu dalam peneletian penulis akan mendeskripsikan bagaimana pengaturan pemidanaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan , serta mengkaji bagaimana proses penerapan pidana terhadap anak pelaku Tindak Pidana Pembunuhan pada perkara Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Slw.

1. Maghfira Vania Putri, skripsi, “Analisis Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Putusan: Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjk)” Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2024.[[11]](#footnote-11)

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Narasumber terdiri dari Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pengumpulan data dengan studi pustaka dan studi lapangan, kemudian diolah menggunakan analisis data yang dilakukan secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa (1) Pemidanaan terhadap pelaku pembunuhan yang dilakukan oleh anak dalam Putusan Nomor: 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjk yang menyatakan bahwa terdakwa anak atas nama FNA telah terbukti bersalah melanggar Pasal 338 KUHP yang telah memenuhi semua unsur dan dalam kasus ini sulit dilakukan upaya diversi karena pembunuhan merupakan tingkat kejahatan yang tergolong berat sehingga anak dijatuhi hukuman penjara.. (2) Dasar pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan pidana penjara di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) terhadap anak pelaku. Tindak pidana pembunuhan terdiri atas pertimbangan yuridis, pertimbangan filosofis dan pertimbangan sosiologis. Pertimbangan yuridis merupakan pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di persidangan dan perbuatan anak telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana pembunuhan. Pertimbangan filosofis merupakan hakim dalam mempertimbangkan pidana yang dijatuhkan pada terdakwa anak untuk memperbaiki perilaku terdakwa anak melalui proses pemidanaan sehingga setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan terpidana dapat memperbaiki dirinya dan tidak lagi melakukan kejahatan. Sedangkan pertimbangan sosiologis merupakan hakim menjatuhkan pidana didasarkan pada latar belakang sosial anak dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat.

Persamaan dalam penelitian yang akan penulis lakukan adalah sama – sama membahas mengenai Tindak Pidana Pembunuhan yang dilakukan oleh Anak, adapun perbedaannya pada permaslahan yang dibahas yaitu dalam peneletian penulis akan mendeskripsikan bagaimana pengaturan pemidanaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan , serta mengkaji bagaimana proses penerapan pidana terhadap anak pelaku Tindak Pidana Pembunuhan pada perkara Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Slw.

1. Raafi Rizqi, Skripsi,Tinjauan Yuridis Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Semarang). Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA), 2021.[[12]](#footnote-12) Hasil Penelitian ini menyebutkan : pertama Pertimbangan bagi hakim dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku pembunuhan yang dilakukan oleh anak dibawah umur di Pengadilan Negeri Semarang adalah pertimbangan yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat luas, perbuatan tergolong sangat sadis, dalam memberikan keterangan terdakwa berbelit-belit sedangkan sesuai dengan yang terdapat dalam Putusan Nomor : 12/Pid. Sus-Anak/2020/PN/ Smg. Kedua berdasarkan dalam memutuskan (Antara lain didasarkan pada faktor diri terdakwa yang dilihat dari segi psikologis, yaitu dilihat dari faktor yang melatarbelakangi seorang terdakwa melakukan tindak pidana pembunuhan).

Persamaan dalam penelitian yang akan penulis lakukan adalah sama – sama membahas mengenai Tindak Pidana Pembunuhan yang dilakukan oleh Anak, adapun perbedaannya pada permaslahan yang dibahas yaitu dalam peneletian penulis akan mendeskripsikan bagaimana pengaturan pemidanaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan , serta mengkaji bagaimana proses penerapan pidana terhadap anak pelaku Tindak Pidana Pembunuhan pada perkara Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Slw.

1. **Metode Penelitian**
2. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis Kepustakaan (*Library research*), Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang menggunakan cara untuk mendapatkan data informasi dengan menempatkan fasilitas yang ada di perpustakaan, seperti buku, majalah, dokumen, artikel dan jurnal.[[13]](#footnote-13) Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan dikarenakan dalam penelitian ini menggunakan literatur atau studi dikumen yang diambil dari bahan – bahan kepustakaan yang telah ada.

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang gunakan adalah”pendekatan normarif. Pendekatan normatif adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan berlandasan analisis norma hukum positif, yurisprudensi (keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap), dan doktrin (pendapat sarjana).[[14]](#footnote-14) Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif karena untuk melacak eksistensi penelitian hukum dari waktu ke waktu. sehingga sejarah dalam konteks ini tidak hanya mendiskripsikan kisah, namun berusaha mengungkap makna dimana dalam penelitian inai bisa menjawab pertanyaan – pertanyaan dalam penelitian ini mengenai bagaimana pengaturan pemidanaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan , serta bagaimana proses penerapan pidana terhadap anak pelaku Tindak Pidana Pembunuhan pada perkara Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Slw.

1. Data Penelitian

Data yang digunakan menggunakan data sekunder. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, berupa publikasi/laporan.[[15]](#footnote-15) Data sekunder yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

1. Bahan Hukum Primer Bahan hukum primer atau bahan hukum positif adalah suatu norma hukum yang mempunyai kekuatan mengikat sesuai undang – undang yang berkaitan persoalan yang akan dibahas yaitu:
2. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
4. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
6. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
7. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang tidak mempunyai kekuatan dan hanya berfungsi sebagai penjelas dari bahan hukum primer. Data sekunder yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan, jurnal penelitian, dan artikel yang berkaitan dengan pemidanaan terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan.
8. Bahan hukum tersier yaitu bahan – bahan penelitian yang diperoleh dari ensiklopedia, dan sejenisnya yang berfungsi mendukung data primer dan data sekunder seperti kamus besar bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, Internet, dan bibliografi. Penelitian ini menggunanakan data sekunder dikarenakan dalam peneletian ini menggunakan data yang berupa aturan tertulis yang ditegakkan oleh negara, bahan hukum yang tidak mempunyai kekuatan hukum yang hanya sebagai penjelasan serta informasi dari bahan hukum yang digunakan seperti bibliografi.
9. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi pustaka. Studi pustaka adalah pengumpulan data yang berupa data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur lain berkaitan dengan permasalahan yang diteliti atau sering disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan.”[[16]](#footnote-16) Penelitian ini menggunakan metode keputakaan karena Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yang merupakan penelitian perpustakaan (library research) berdasarkan data sekunder, yang relevan dengan pemidanaan terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan.

1. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang dipergunakan adalah analisis data Interaktif, ialah teknik analisis data yang terdiri atas empat komponen proses analisis,yaitu pengumpulan data digunakan untuk mengumpulkan data-data atau fakta-fakta yang digunakan untuk bahan penelitian, dengan cara analisis dokumen, reduksi data merupakan bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perludan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa, sehingga dapat ditarik simpulan akhir. penyajian data dan penarikan simpulan.[[17]](#footnote-17)

1. **Sistematika Penulisan**

Sistematika penelitian ini dperlukan agar dapat dilakukan secara sistematis dan terarah. Sistematika yang digunakan untuk memberikan jabaran singkat mengenai isi dari keseluruhan penelituan ini. Penelitian ini disusun dengan sistematika yang dibagii menjadi 4 (empat) bab, yakni

Bab I, Pendahuluan. Bab ini mengruaikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, urgensi penelitian, tinjuan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II, Tinjauan Konseptual. Bab ini menguraikan tentang norma-norma, teori hukum yang berhubungan dengan apa yang akan dibahas diantaranya, Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pembunuhan, Tinjauan Umum Tentang Pidana dan Pemidanaan, Tinjauan Umum Tentang Anak, Tinjauan Umum Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Bab III, Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini membahas data hasil penelitian yang telah diolah yang disusun sesuai urutan permasalahan mengenai bagaimana pengaturan pemidanaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan , serta bagaimana proses penerapan pidana terhadap anak pelaku Tindak Pidana Pembunuhan pada perkara Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Slw.

.Bab IV, Penutup. Bab ini merupakan kristalisasi semua yang telah dibahas sebelumnya dan menjawab perumusalan masalah meliputi simpulan dan saran.

**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA**

## Tinjauan Umum Tentang Hukum dan Hukum Pidana, Tindak Pidana Pidana dan Pemidanaan

## Pengertian Hukum dan Hukum Pidana

Sampai saat ini, pengertian hukum belum ada yang pasti. Atau dengan kata lain, belum ada sebuah pengertian hukum yang dijadikan standar dalam memehami makna dan konsep hukum.[[18]](#footnote-18)

Notohamidjojo mendefinisikan hukum adalah sebagai keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa, untuk kelakuan manusia dalam masyarakat Negara yang mengarah kepada keadilan, demi terwujudnya perdamaian, dengan tujuan menganggap manusia dalam masyarakat.[[19]](#footnote-19)

Menurut Soedarto pidana adalah penderitaan yang sengaja di bebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.[[20]](#footnote-20)

Hukum Pidana diartikan sebagai suatu ketentuan undang-undang yang menentukan perbuatan yang dilarang untuk dilakukan dan ancaman sanksi terhadap pelanggaran larangan tersebut. Banyak ahli berpendapat bahwa Hukum Pidana menempati tempat tersendiri dalam sistemik hukum, hal ini disebabkan karena hukum pidana tidak menempatkan norma sendiri, akan tetapi memperkuat norma-norma di bidang hukum lain dengan menetapkan ancaman sanksi atas pelanggaran norma-norma di bidang hukum lain tersebut.[[21]](#footnote-21)

Pengertian diatas sesuai dengan asas hukum pidana yang terkandung dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP dimana hukum pidana bersumber pada peraturan tertulis (undang-undang dalam arti luas) disebut juga sebagai asas legalitas.

Berlakunya asas legalitas memberikan sifat perlindungan pada undang-undang pidana yang melindungi rakyat terhadap pelaksanaan kekuasaan yang tanpa batas dari pemerintah.

Hukum mempunyai sifat mengatur dan memaksa setiap orang supaya mentaati tata tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas (berupa hukuman) terhadap siapa saja yang tidak mau mematuhinya.[[22]](#footnote-22)

Aturan aturan yang bersifat mengatur dan memaksa anggota masyarakat untuk patuh dan menaatinya, akan meyebabkan terjadinya keseimbangan dan kedamaian dalam kehidupan mereka.

Para pakar hukum pidana mengutarakan bahwa tujuan hukum pidana adalah pertama, untuk menakut-nakuti orang agar jangan sampai melakukan kejahatan (preventif). Kedua, untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabi’atnya (represif).[[23]](#footnote-23)

Tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan orang perseorangan atau hak asasi manusia dan masyarakat. Tujuan hukum pidana di Indonesia harus sesuai dengan falsafah Pancasila yang mampu membawa kepentingan yang adil bagi seluruh warga negara.

Hukum pidana di Indonesia adalah mengayomi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan hukum pidana dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:[[24]](#footnote-24)

* + 1. Tujuan hukum pidana sebagai hukum Sanksi. Tujuan ini bersifat konseptual atau filsafati yang bertujuan member dasar adanya sanksi pidana. Jenis bentuk dan sanksi pidana dan sekaligus sebagai parameter dalam menyelesaikan pelanggaran pidana. Tujuan ini biasanya tidak tertulis dalam pasal hukum pidana tapi bisa dibaca dari semua ketentuan hukum pidana atau dalam penjelasan umum.
    2. Tujuan dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap orang yang melanggar hukum pidana. Tujuan ini bercorak pragmatik dengan ukuran yang jelas dan konkret yang relevan dengan problem yang muncul akibat adanya pelanggaran hukum pidana dan orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana. Tujuan ini merupakan perwujudan dari tujuan pertama.

Berikut ini disebutkan pula beberapa pendapat yang dikemukakan oleh Sudarto, bahwa fungsi hukum pidana itu dapat dibedakan sebagai berikut:[[25]](#footnote-25)

* 1. Fungsi yang umum

Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari hukum, oleh karena itu fungsi hukum pidana juga sama dengan fungsi hukum pada umumnya, yaitu untuk mengatur hidup kemasyarakatan atau untuk menyelenggarakan tata dalam masyarakat.

* 1. Fungsi yang khusus

Fungsi khusus bagi hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya (*rechtsguterschutz*) dengan sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam jika dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada cabang hukum lainnya. Dalam sangsi pidana itu terdapat suatu *tragic* (suatu yang menyedihkan) sehingga hukum pidana dikatakan sebagai “mengiris dagingnya sendiri” atau sebagai “pedang bermata dua”, yang bermakna bahwa hukum pidana bertujuan untuk melindungi kepentingan- kepentingan hukum (misalnya: nyawa, harta benda, kemerdekaan, kehormatan), namun jika terjadi pelanggaran terhadap larangan dan perintahnya justru mengenakan perlukaan (menyakiti) kepentingan (benda) hukum si pelanggar. Dapat dikatakan bahwa hukum pidana itu memberi aturan- aturan untuk menaggulangi perbuatan jahat. Dalam hal ini perlu diingat pula, bahwa sebagai alat *social control* fungsi hukum pidana adalah *subsidair*, artinya hukum pidana hendaknya baru diadakan (dipergunakan) apabila usaha-usaha lain kurang memadai.

## Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam Hukum Pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah “Perbuatan jahat” atau “Kejahatan” (*Crime atau Verbrechen atau misdaad*) yang bisa diartikan secara yuridis (Hukum) atau secara kriminologis. Mengenai hal ini telah dikemukakan diatas, Muljatno, guru besar Hukum Pidana pada Universitas Gadjah Mada dalam pidato, beliau beliau pada dies natalis Universitas universitas tersebut pada tahun 1955 yang berjudul “Perbuatan pidana dan pertanggung jawab dalam hukum Pidana”. Beliau membedakan dengan tegas “dapat dipidananya perbuatan” (*de strafbaarheid van het feit atau het verboden zijr van het feit*) dan “dapat dipidananya orangnya” (*strafbaarheid van den persoon*), dan sejalan dengan ini beliau memisahkan antara pengertian “perbuatan pidana” (*criminal act*) dan “Pertanggungan jawab pidana” (*criminal responsibility atau criminal liability*).[[26]](#footnote-26)

Pandangan beliau dapat disebut pandangan yang dualistik mengenai perbuatan pidana (tindak pidana atau *strafbaarfeit*). Pandangan ini adalah penyimpangan dari pandangan yang disebut beliau sebagai pandangan yang monistic yang dianggapnya kuno. Pandangan monistic ini melihat keseluruhan (tumpukan) syarat adanya pidana itu kesemuanya merupakan sifat dari perbuatan. Dibawah ini akan diberikan berturut pendapat para penulis mengenai tindak pidana (*strafbaar feit*), dan disebutkan mengenai unsur-unsurnya. Golongan pertama adalah mereka yang bisa di maksudkan ke dalam “aliran monistik”dan kemudian akan dikemukakan mereka yang dapat disebut sebagai yang mempunyai pandangan “dualistik”.[[27]](#footnote-27) Golongan pertama aliran monistik adalah antara lain.[[28]](#footnote-28)

## D. Simons

*Strafbaar feit adalah “een strafbaar gestelde, onrechmatige, met schuld verband staande handeling van een toerekeningsvatbaar persoon” .* Berdasar unsur-unsur *strafbaar feit* adalah :

1. Perbuatan manusia (*positief atau negatief*; berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan),
2. Diancam dengan pidana (*Stratbaar gesteld*).
3. Mealawan hukum *(onrechmatig)*
4. Dilakukan dengan kesalahan *(met schuld in verband staand)*,
5. Orang yang mampu bertanggung jawab *(toerekeningsvatbaar person).*

Simons menyebut adanya unsur objektif dan unsur subyektif yang dari stafbaar feit, yang disebut sebagai unsur objektif ialah :

1. Perbuatan orang,
2. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu,
3. Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam pasal 281 KUHP sifat “*openbaar*” atau “di muka umum”

Segi subjektif dari *strafbaar feit* :

1. Orang yang mampu bertanggung jawab.
2. Adanya kesalahan (*dolus* atau *culpa*). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan.

Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan keadaan mana perbuatan dilakukan.

## Van hamel. Definisinya

*Strafbaar feit adalah een wettelijk omschreven menschelijke gedraging, onrechtmatig, strafwaardig en aan schuld tewijten”.*

1. Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang,
2. Melawan hukum,
3. Dilakukan dengan kesalahan dan
4. Patut dipidana.

Penulis-penulis Jerman yang berpandangan monistik dapat pula disebut dibawah ini.[[29]](#footnote-29)

## Mezger

*Die Straftat ist der inbegriff der voraussetzungen der strafe* (Tindak pidana adalah keseluruhan syarat untuk adanya pidana).Selanjutnya dikatakan *Die Straftat ist demnach tatbes-tandlich- rechtwidrige, pers onlich-zurechenbare strafbedrohte Handlung*. Dengan demikian unsur-unsur tindak pidana ialah :

1. Perbuatan dalam arti yang luas dari manusia (aktif atau membiarkan)
2. Sifat melawan (baik bersifat objektif maupun yang subjektif)
3. Dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang,
4. Diancam dengan pidana.

## Wirjono Prodjodikoro

Wirjono Prodjodikoro mengemukakan definisi pendek, yakni: Tindak Pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana. Jelas sekali dari dari definisi-definisi tersebut diatas tidak adanya pemisahan antara *criminal act* dan *criminal responsibility*. Selanjutnya akan disebut mereka yang bisa dimasukkan sebagai golongan yang mempunyai pandangan dualistik tentang syarat-syarat pemidanaan.[[30]](#footnote-30)

## Jenis-Jenis Tindak Pidana

Setelah penulis menguraikan mengenai Pengertian dari tindak pidana dan dari segi unsur-unsur nya maka kali ini penulis akan menguraikan dari segi jenis-jenis tindak pidana, secara umum tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu :

* + 1. Tindak pidana dapat dibedakan secara kualitatif atas kejahatan dan pelanggaran.[[31]](#footnote-31)
       1. Kejahatan

Secara *doctrinal* kejahatan adalah *rechtdelicht*, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Misalnya : pembunuhan, pencurian, dan sebagainya.

* + - 1. Pelanggaran

Jenis tindak pidana ini disebut *wetsdelicht*, yaitu perbuatan- perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai suatu tindak pidana, karena undang-undang merumuskannya sebagai delik misalnya, pelanggaran lalu lintas dan sebagainya.

* + 1. Menurut cara merumuskanya, tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana formil dan tindak pidana materil.45
       1. Tindak pidana formil

Adalah tindak pidana yang perumusannya dititik beratkan pada perbuatan yang dilarang. Artinya tindak pidana dianggap telah terjadi atau selesai dilakukanya perbuatan yang dilarang undang- undang, tanpa mempersoalkan akibat. Misalnya : Pencurian, dan sebagainya.

* + - 1. Tindak pidana materil

Adalah tindak pidana yang perumusannya dititik beratkan pada akibat yang dilarang. Artinya tindak pidana baru dianggap telah terjadi apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi. Misalnya pembunuhan.

* + 1. Berdasarkan bentuk kesalahanya, tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana kesengajaan dan tindak pidana kealpaan (*delik dolus* dan *delik culpa*).[[32]](#footnote-32)
       1. Tindak pidana Kesengajaan/*delik dolus*

Adalah tindak pidana yang memuat unsur kesengajaan. Misalnya : Tindak pidana pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP, tindak pidana pemalsuan mata uang dalam Pasal 245 KUHP, dll

* + - 1. Tindak pidana kealpaan/*delik culpa*

Adalah tindak pidana yang memuat unsur kealpaan. Misalnya Delik yang diatur dalam Pasal 359 KUHP, yaitu karena kealpaanya mengakibatkan matinya orang, dan sebagainya.

* + 1. Berdasarkan macam-macam perbuatanya, tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana/*delik comissionis*, *delik omissionis*, dan *delik comissionis per omissionis comissa.[[33]](#footnote-33)*
       1. Delik *comissionis*

Adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu berbuat sesuatu yang dilarang. Misalnya : melakukan penipuan, pembunuhan, perjudian, dan sebagainya.

* + - 1. Delik *omissionis*

Adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintah. Misalnya tidak menghadap sebagai saksi di muka persidangan sebgaimana ditentukan dalam Pasal 552 KUHP.

* + - 1. Delik *comissionis per omissionis comissa.[[34]](#footnote-34)*

Adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, akan tetapi dilakukan dengan cara tidak berbuat. Misalnya seorang ibu yang membunuh anaknya dengan cara tidak memberi air susu (pelanggaran terhadap larangan untuk membunuh sebagaimana diatur dalam Pasal 338 atau 340 KUHP).

## Pidana dan Pemidanaan

Pidana merupakan aturan hukum yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana jadi dapat diketahui bahwa pada dasarnya hukum pidana berpokok pada 2 (dua) hal, yaitu sebagai berikut:[[35]](#footnote-35)

* + 1. Perbuatan yang memenuhi syarat tertentu.
    2. Pidana

Pidana yang dimaksud mengenai perbuatan yang harus memenuhi syarat-syarat tertentu adalah perbuatan yang memiliki adanya sebuah perbuatan yang mendapatkan pemberian sanksi pidana yang biasa disebut dengan “perbuatan yang pidana” atau disingkat “perbuatan jahat” dalam hal ini harus ada orang yang melakukan perbuatan pidana sehingga dalam permasalahan ini dapat dibagi menjadi perbuatan yang dilarang dan orang yang melanggar larangan.

Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan memenuhi syarat tertentu, dengan hal tersebut dapat dijelaskan bahwa dalam pidana yang menjadi subyek dalam pidana adalah orang yang melakukan tindak pidana baik itu pelanggaran atau kejahatan akan mendapatkan sanksi tertentu sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terdapat jenis-jenis pidana yang tercantum dalam Pasal 10 KUHP yaitu:

1. Pidana Pokok :
   1. Pidana Mati
   2. Pidana Penjara
   3. Pidana Kurungan
   4. Pidana Denda
   5. Pidana Tutupan
2. Pidana Tambahan :
   1. Pencabutan hak tertentu,
   2. Perampasan barang tertentu,
   3. Pengumuman putusan hakim.

## Tujuan Pemidanaan

Hukum yang berlaku di indonesia saat ini belum dijelaskan mengenai tujuan pemidanaan, dewasa ini mengenai tentang adanya rencana tentang tujuan pemidanaan masih terdapat dalam wacana, tetapi dalam merumuskan mengenai tujuan pemidanaan tersebut penulis akan memberikan tujuan pemidanaan yaitu sebagai berikut :

* + 1. Tujuan pemidanaan menurut Wirjono Prodjodikoro yaitu :

Menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakut nakuti orang banyak *(generals preventif)* maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi *(Speciale preventif)*, atau Untuk mendidik atau memperbaiki orang orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik kelakuannya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.[[36]](#footnote-36)

* + 1. Tujuan pemidanaan dalam literatur Bahasa inggris disingkat 3R & 1D yaitu :
       1. *Reformation*, yang berarti memperbaiki atau merehabilitasi penjahat menjadi orang baik berguna bagi masyarakat
       2. *Restraint* maksudnya mengasingkan pelanggar dari masyarakat
       3. *Retribution* yang berarti pembalasan terhadap pelanggar karena telah melakukan kejahatan;
       4. *Detterence* berarti menjera atau mencegah sehingga baik terdakwa sebagai individual maupun orang lain yang potensial menjadi penjahat akan jera atau takut melakukan kejahatan, melihat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa.[[37]](#footnote-37)

Berdasarkan yeng terdapat dalam tujuan pemidanaan tersebut diharapkan dapat menjadi hal yang dapat membantu masyarakat dalam penegakan hukum terutama terhadap pelaku tindak pidana, sehingga pelaku tindak pidana dapat memiliki sarana yaitu rehabilitasi, resosialisasi dalam pembentukan dari perkembangan manusia dengan menitikberatkan dalam aspek psikologi sehingga dapat menghilangkan rasa bersalah bagi yang bersangkutan. Walaupun pidana merupakan suatu nestapa tetapi tidak memiliki maksud untuk memberikan balasan bagi pelaku tindak pidana melainkan untuk memberikan efek jera sehingga pelaku tindak pidana tidak mengulangi perbuatan itu lagi.

## Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pembunuhan

## Pengertian Pembunuhan

Pengertian pembunuhan adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dan beberapa orang yang mengakibatkan seseorang dan beberapa orang meninggal dunia.[[38]](#footnote-38) Tindak pidana pembunuhan didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana termasuk ke dalam kejahatan terhadap nyawa *(misdrijven tegen het leven)* adalah penyerangan terhadap nyawa orang lain.[[39]](#footnote-39)

Pembunuhan merupakan setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menghilangkan/merampas nyawa orang lain sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 338 KUHP yang berbunyi “Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun” (Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Istilah Pembunuhan sendiri berasal dari kata bunuh yang berarti mematikan, menghilangkan nyawa. Membunuh artinya membuat supaya mati. Pembunuh artinya orang atau alat yang yang membunuh dan pembunuhan berarti perkara yang dilakukan oleh pembunuh, perbuatan yang menyeimbangkan dari aspek aspek yang berkaitan dengan nyawa, suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai pembunuhan adalah perbuatan oleh siapa saja yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain.[[40]](#footnote-40)

Pembunuhan menurut Kamus besar Bahasa Indonesia berasal dari kata bunuh, yang berarti mematikan dengan sengaja,dalam hukum pidana pembunuhan merupakan berkaitan dengan nyawa, dalam KUHP ketentuan pidana tentang kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang lain diatur dalam buku II Bab XIX yang terdiri dari 13 Pasal, yakni Pasal 338 sampai Pasal 350.[[41]](#footnote-41)

Menurut lamintang untuk menghilangkan nyawa orang lain seorang pelaku harus melakukan sesuatu atau rangkaian Tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatam bahwa opzet dari pelaku itu harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain.[[42]](#footnote-42) Dengan kata lain berdasarkan pengertian yang telah dikemukakan oleh Lamintang bahwa delik pembunuhan termasuk dalam delik materiil (*materieel delict*), yang merupakan suatu delik yang dirumuskan secara materii, yakni delik yang baru dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya apabila timbul akibat yang dilarang (akibat konstitutif atau *constitutief-gevolg*) yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang.[[43]](#footnote-43)

Perbuatan menghilangkan nyawa terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi yaitu:

* + 1. Adanya wujud perbuatan
    2. Adanya kematian
    3. Adanya hubungan sebab akibat perbuatan dan kematian.

## Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan

* + 1. Unsur subyektif : perbuatan dengan sengaja (*doodslag*) artinya bahwa perbuatan itu disengaja dan kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga, karena sengaja (*opzetz*/*dolus*) yang dimaksud berdasarkan dalam pasa 338 KUHP adalah pebuatan yang dilakukan dengan sengaja tanpa direncanakan terlebih dahulu dan yang terdapat dalam Pasal 339 adalah pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh sesuatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaanya, atau melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun sedangkan yang dimaksud sengaja dalam pasal 340 adalah suatu perbuatan yang disengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain yang terbentuk dengan direncanakan terlebih dahulu (*met Voorbedachte rade*)
    2. Unsur obyektif : perbuatan menghilangkan nyawa dan orang lain, unsur obyektif yang pertama dari tindak pembunuhan yaitu menghilangkan, unsur ini juga diliputi oleh kesengajaan artinya pelaku harus menghendaki, dengan sengaja, dilakukannya Tindakan menghilangkan tersebut, dan ia pun harus mengetahui bahwa tindakannya itu bertujuan menghilangkan nyawa orang lain.

## Macam-Macam Pembunuhan

Berikut adalah macam-macam pembunuhan yang diatur dalam KUHP yaitu.[[44]](#footnote-44)

* + 1. Pembunuhan biasa (Pasal 338) yang berbunyi :

“barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain,diacam karena pembunuhan dengan penjara paling lama lima belas tahun”

* + 1. Pembunuhan dengan pemberatan (Pasal 339) yang berbunyi :

“pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh suatu tindak pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaanya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun pesera lainnya dari pidana bila tertangkap tangan, ataupun memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum,diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun”

* + 1. Pembunuhan berencana (Pasal 340), yang berbunyi :

“Barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun”

* + 1. Pembunuhan bayi oleh ibunya (Pasal 341), yang berbunyi:

“Seorang ibu yang karena takut akan diketahui bahwa dia melahirkan anak dengan sengaja menghilangkan nyawa anaknya pada saat anak itu dilahirkan atau tidak lama kemudia, diancam karena membunuh anak sendiri, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”

* + 1. Pembunuhan bayi berencana (Pasal 342) yang berbunyi :

“Seorang ibu yang untuk melaksanakan keputusan yang diambilnya karena takut akan diketahui bahwa dia akan melahirkan anak, menghilangkan nyawa anaknya pada saat anak itu dilahirkanatau tidak lama kemudian, diancam karena melakukan pembunuhan anak sendiri dengan berencana, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”

* + 1. Pembunuhan atas permintaan yang bersangkutan (Pasal 344) yang berbunyi :

“Barang siapa merampas nyawa orang lain atas permintaan sungguh-sungguh dari orang itu sendiri, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”

* + 1. Membujuk/membantu agar orang bunuh diri (Pasal 345), yang berbunyi :

“Barang siapa dengan sengaja membujuk orang lain untuk bunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu atau memberi sarana kepadanya untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun kalau orang itu jadi bunuh diri”

* + 1. Pengguguran kandungan atas izin ibunya (Pasal 346) yang berbunyi:

“Seorang wanita yang dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”

* + 1. Pengguguran kandungan dengan tanpa izin ibunya (Pasal 347), yang berbunyi :

“Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuan wanita itu diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun Jika perbuatan itu mengakibatkan wanita itu meninggal, dia diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

* + 1. Matinya kandungan dengan izin perempuan yang mengandung (348), yang berbunyi:

“Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuan wanita itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan Jika perbuatan itu mengakibatkan wanit aitu meninggal, dia diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”

* + 1. Dokter / bidan / tukang obat yang membantu pengguran/matinya kandungan (Pasal 349), yang berbunyi :

“Jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan tersebut dalam pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatanyang diterangkan dalam Pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam Pasal-Pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapatdicabut haknya untuk menjalankan pekerjaannya dalam mana kejahatan itu dilakukan”.

## Tinjauan Umum tentang Anak

* 1. **Pengertian Anak**

Anak merupakan amanah dan anugrah yang diberikan oleh Allah SWT, yang harus dijaga sebaik baiknya karena dalam diri anak sudah melekat hak, martabat dan hak sebagai manusia, selain itu anak adalah bagian yang dari generasi sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi serta penerus cita-cita perjuangan bangsa.

Indonesia saat ini terdapat beberapa pengertian tentang anak menurut peraturan perundang-undangan, yang mengatur mengenai itu, selain itu terdapat juga pengertian menurut para ahli namun dengan berdasar dalam pengertian anak tidak terdapat kesamaan karena latar belakang yang dimaksud dan tujuan masing-masing maupun para ahli.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang sistem Peradilan Pidana Anak Dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.[[45]](#footnote-45)

Berdasarkan pada halaman tersebut, terdapat perbedaan pandangan mengenai Batasan umur anak menurut pandangan para ahli antara lain:

* + 1. Pengertian batas umur anak menurut Bisma Siregar

Menurut Bisma siregar dalam bukunya menyatakan bahwa : dalam masyarakat yang sudah mempunyai hukum tertulis diterapkan Batasan umur yaitu 16 tahun atau 18 tahun ataupun usia tertentu yang menurut perhitungan pada usia itulah si anak bukan lagi termasuk atau tergolong anak tetapi sudah dewasa.[[46]](#footnote-46)

* + 1. Pengertian batas umur anak menurut Sugini

Sebagaimana yang dikutip dalam bukuh Karya meladi Gultom mengatakan bahwa “selama ditubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, anak itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa bila proses perkembangan dan pertumbuhan itu selesai, jadi batas umur anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan 21 (dua puluh satu)tahun untuk laki laki.[[47]](#footnote-47)

Berdasarkan pengertian beserta batasan umur yang yang dijelaskan oleh para ahli tersebut telah dijelaskan diatas bahwa anak yang menjadi batasan umur tersebut memiliki perbedaan baik yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu berupa hukum positif atau hukum adat, karena bahwa sesuai yang telah diterapkan dalam hukum positif tersebut memiliki efektifitas yang terdapat dalam masing masing perspektif.

* 1. **Sistem Peradilan Anak**

Tindak pidana anak adalah tindak Pidana yang dilakukan oleh anak, Tindak pidana anak memiliki hubungan dengan istilah *juvenile Deliquency*, istilah ini menurut bahasa Indonesia dikenal dengan macam-macam istilah, yaitu Kenakalan pemuda, taruna tersesat, ataupun jalinan *quersi*. Secara etimologis dapat dijabarkan bahwa *“Juvenile”* berarti “anak” sedangkan *“Deliquency”* berarti “kejahatan Anak” sedangkan apabila menyangkut subyek atau pelakunya, amka *juvenile Deliquency* berarti penjahat anak atau anak jahat.

Berdasarkan Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana yang dimaksud dengan Anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 butir 2 yaitu “Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana, ketentuan mengenai anak berdasarkan dari UU No. 11 tahun 2012 yaitu :

1. Anak yang berhadapan dengan hukum

Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang menjadi korban tindak pidana, anak yang menjadi saksi tindak pidana

1. Anak yang berkonflik dengan hukum

Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana

1. Anak yang menjadi Korban tindak pidana

Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana

1. Anak yang menjadi saksi tindak pidana

Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepetingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan atau dialaminya sendiri.[[48]](#footnote-48)

Anak sebagai pelaku tindak pidana memiliki sanksi yang terdapat dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur mengenai bagaimana penjatuhan saksi dan bentuk sanksi terhadap anak yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 69.

Sanksi pidana diterapkan kepada pelaku tindak pidana anak yang terdapat yaitu pidana pokok dan pidana tambahan sebagai berikut :

1. Sanksi pidana

Pidana Pokok terdiri atas :

1. Pidana peringatan
2. Pidana dengan syarat :
   1. Pembinaan diluar lembaga
   2. Pelayanan masyarakat;atau
   3. Pengawasan
3. Pelatihan kerja
4. Pembinaan dalam Lembaga;dan
5. Penjara

Pidana tambahan terdiri atas :

1. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;atau
2. Pemenuhan kewajiban adat
3. Sanksi Tindakan

Sanksi Tindakan yang diterapkan Pelaku tindak pidana anak sebagai berikut:

1. Pengembalian kepada orang tua/wali
2. Penyerahan kepada seseorang
3. Perawatan dirumah sakit jiwa
4. Perawatan di LPKS
5. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta
6. Pencabutan surat izin mengemudi
7. Perbaikan akibat tindak pidana.

Berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur mengenai anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun yang melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, penyidik, pembimbing, kemasyarakatan, dan pekerja profesional mengambil keputusan untuk :

1. Menyerahkan kembali kepada orang tua /wali
2. Mengikutsertakan dalam program Pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPSK di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial baik di tingkat pusat maupun daerah paling lama 6 (enam bulan).

1. Jimly Asshiddiqie, Penegakan Hukum, “*Jurnal Pencurian Hukum dan Masyarakat*”, Vol. 54 No. 10, 2018,hlm. 1 [↑](#footnote-ref-1)
2. Adami Chazawi. Kejahatan Terhadap Nyawa dan Tubuh, Raja Grafindo Persada : Jakarta, .2014, hlm 45 [↑](#footnote-ref-2)
3. Salvadoris Pienter, *Pembuktian Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,* Vol, 3 No 1, Mei, 2019, Hlm 78. [↑](#footnote-ref-3)
4. *Ibid*, hlm 55 [↑](#footnote-ref-4)
5. Wagiati Soetodjo, Hukum Pidana Anak, edisi Revisi, Cet, 4, PT. Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm 73 [↑](#footnote-ref-5)
6. Gultom Maidin: *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*. Bandung: Refika Aditama, 2014, hlm 59 [↑](#footnote-ref-6)
7. Romli Atmasasmita, Peradilan Anak di Indonesia, Bandung, 1997, hlm 32 [↑](#footnote-ref-7)
8. Kanter dan Sianturi. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Sturia Grafika : Jakarta. 2002. hlm 35 [↑](#footnote-ref-8)
9. Romli Atmasasmita, *Op.Cit*, hlm 34 [↑](#footnote-ref-9)
10. Afif Fadhly,Skripsi, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan No. 1291/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Mks),*  Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar, 2016 [↑](#footnote-ref-10)
11. Maghfira Vania Putri, skripsi, *Analisis Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Putusan: Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjk),* Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2024 [↑](#footnote-ref-11)
12. Raafi Rizqi, Skripsi, *Tinjauan Yuridis Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Semarang)*, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA), 2021 [↑](#footnote-ref-12)
13. Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet. 1, Bandung: PT. Citra AdityaBakti, hlm. 52 [↑](#footnote-ref-13)
14. Yati Nurhayati, Ifrani Ifrani, and M. Yasir Said, “Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum,” *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2021), hlm.4. https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14. [↑](#footnote-ref-14)
15. *Op.cit*.hlm.25-26 [↑](#footnote-ref-15)
16. *Ibid*, hlm 26 [↑](#footnote-ref-16)
17. Miles, M.B, Huberman, A.M, & Saldana, J. 2014*, Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*, Edition 3. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press [↑](#footnote-ref-17)
18. Ranidar Darwis*, Pendidikan Hukum dalam Konteks Sosial Budaya bagi Pembinaan Kesadaran Hukum Warga Negara*, Bandung, Departemen Pendidikan Indonesia UPI, 2003, Hlm 6 [↑](#footnote-ref-18)
19. O. Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Salatiga, Griya Media, 2011, Hlm 121 [↑](#footnote-ref-19)
20. Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, 2005,

    Hlm. 2 [↑](#footnote-ref-20)
21. M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan HUKUM PIDANA*, Jakarta, Sinar Grafika, 2015, Hlm 3. [↑](#footnote-ref-21)
22. Suharto dan Junaidi Efendi, *Panduan Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana, Mulai Proses Penyelidikan Sampai Persidangan*, Jakarta, Prestasi Pustaka, 2010, Hlm 25-26 [↑](#footnote-ref-22)
23. Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, PT. Refika Aditama, Hlm. 20. [↑](#footnote-ref-23)
24. Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta, Rajawali Press, 2010, Hlm 7 [↑](#footnote-ref-24)
25. Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang, Yayasan Sudarto, 1990, Hlm 9 [↑](#footnote-ref-25)
26. Sudarto, *Hukum Pidana 1*, Yayasan Sudarto, Semarang, 2009. Hlm.66 [↑](#footnote-ref-26)
27. *Ibid*, Hlm 67 [↑](#footnote-ref-27)
28. *Ibid*, Hlm 67 [↑](#footnote-ref-28)
29. *Ibid*, hlm. 70. [↑](#footnote-ref-29)
30. *Ibid,* Hlm 69 [↑](#footnote-ref-30)
31. Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam perspektif pembaruan, UMM Press Malang, 2009, Hlm 105* [↑](#footnote-ref-31)
32. *Ibid*, hlm. 117. [↑](#footnote-ref-32)
33. *Ibid,* Hlm, 120 [↑](#footnote-ref-33)
34. *Ibid,* Hlm, 120 [↑](#footnote-ref-34)
35. Sudarto, *Hukum Pidana 1*, cetakan ketiga, Yayasan Sudarto d/a fakultas Hukum Undip, Semarang, 2009, Hlm 13-14 [↑](#footnote-ref-35)
36. <http://raypratama.blogspot.com/2012/02/pengertian-jenis-jenis-dan-tujuan.html> diakses pada tanggal 20 Agustus 2021 pukul 19:14 [↑](#footnote-ref-36)
37. Didik Endro Purwoleksono, Kontroversi Hukuman Mati Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi, PT. GramediaF Kompas, Jakarta, 2009, Hlm 251 [↑](#footnote-ref-37)
38. Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta:Sinar Grafika, 2007, Hlm 24 [↑](#footnote-ref-38)
39. Adami Chazawi, Op.Cit, Hlm. 55 [↑](#footnote-ref-39)
40. Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, Bandung:Alumni, 1992, Hlm 129 [↑](#footnote-ref-40)
41. <https://kbbi.web.id/bunuh> yang diakses pada tanggal 25 Agustus 2021 [↑](#footnote-ref-41)
42. P.A.F. Lamintang.Opcit. Hlm.1 [↑](#footnote-ref-42)
43. *Ibid*, Hlm 1 [↑](#footnote-ref-43)
44. KUHP Pasal 338-349 [↑](#footnote-ref-44)
45. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak [↑](#footnote-ref-45)
46. Bisma Siregar, *Keadilan Hukum dalam Berbagai aspek Hukum Nasional*, Jakarta : Rajawali, 1986, Hlm 105 [↑](#footnote-ref-46)
47. Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak,* Bandung:P.T Refika Aditama, 2010, Hlm. [↑](#footnote-ref-47)
48. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Hlm 2 [↑](#footnote-ref-48)